

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Disusun oleh :

MUHAMMAD FAKHRUR REZA

NIM : 155020201111077

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2019



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan MT. Haryono 165 Malang 6541, Indonesia
Telp. +62341-555000 (Hunting), 551396, Fax.553834
E-mail : feb@ub.ac.id <http://www.feb.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Bahasa Indonesia :

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Skripsi dengan judul Bahasa Inggris :

THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE OF FINANCIAL PERFORMANCE (A Study Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange)

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Fakhrur Reza
NIM : 15502020111077
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Manajemen**
Konsentrasi : Keuangan

Judul di atas disetujui untuk diajukan dalam ujian komprehensif.

KPS, S1 Manajemen,

Dr. Siti Aisjah, SE.,MS.,CSRS.,CFP
NIP.19601111 198601 2 001

Dosen Pembimbing

Dr. Atim Djazuli, SE., MM., CFP.
NIP. 19600801 198603 1 005



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Fakhur Reza
NIM : 155020201111077
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Keuangan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 15 April ,2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Atim Djazuli., SE., MM., CFP

NIP. 19600801 198603 1 005

(Sebagai Pembimbing)

2. Dr. Himmiyatul Amanah Jiwa Juwita., SE., MM., CFP

NIP. 19611220 198601 2 001

(Sebagai Penguji I)

3. Risna Wijayanti., SE., MM., Ph.D., CFP

NIP. 19620510 198601 2 001

(Sebagai Penguji II)

Malang. April 2019

Ketua Program Studi S1 Manajemen,

Dr. Siti Aisjah, SE., MS., CSRS., CFP
NIP.19601111 198601 2 001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini , saya :

Nama : Muhammad Fakhrrur Reza
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta / 15 Juli 1998
Nomor Induk : 155020201111977
Jurusan : S-1 Manajemen
Konsentrasi : Keuangan
Alamat : Perumahan Griyashanta Blok L141

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **SKRIPSI** berjudul : PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang,

Yang membuat pernyataan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. Atim Djazuli. SE., MM., CFP.
NIP. 19600801 198603 1 005



Muhammad Fakhrrur Reza
NIM. 155020201111077



RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fakhrrur Reza
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Kalibaru timur gang 5 No. 72H
Alamat di Malang : Perumahan Griyashanta Blok L 141
No. Hp : 082298036529
Alamat e-mail : reza7889@yahoo.com



Riwayat Pendidikan

1. TK Darussalam, 2002-2003
2. Sekolah Dasar Bungur 03 Pagi, 2003-2009
3. Sekolah Menengah Pertama 78 Jakarta, 2009-2012
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jakarta, 2012-2015
5. S-1 Manajemen, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015-2019

Pengalaman Organisasi

1. Staf Tetap Departemen Sumber Daya Manusia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2017)
2. Ketua Departemen Sumber Daya Manusia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2018)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Ketua Pelaksana Management League (2016)
2. Koordinator Divisi Transkoper Management Edutainment (2017)
3. Koordinator Steering Committee Management Festival (2018)
4. Steering Committee Management League (2018)
5. Steering Committee Management League (2018)

Riwayat Pekerjaan

1. Staf Magang PT Bank CIMB Niaga (Unit Usaha Syariah)

repository.ub.ac.id

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Muhammad Fakhrur Reza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

reza7889@yahoo.com

Dosen Pembimbing:

Atim Djazuli

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yang bertujuan mengetahui pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 9 perusahaan perbankan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan serta *website* Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komisaris independen dan kepemilikan insitusal terhadap kinerja keuangan, sedangkan *corporate social responsibility* dan komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* belum dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh investor dalam menanamkan modalnya, dan komite audit belum bisa memaksimalkan tugasnya dalam membantu dewan komisaris.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan

**THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND
GOOD CORPORATE GOVERNANCE OF FINANCIAL PERFORMANCE**
(A Study Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange)

By:
Muhammad Fakhur Reza
Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya
reza7889@yahoo.com

Supervisor:
Atim Djazuli

ABSTRACT

The purpose of this study aims to test and analyze the influence of corporate social responsibility and good corporate governance on financial performance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This type of research is explanatory research which aims to determine the influence between variables through testing the hypothesis. The sampling technique used was purposive sampling and obtained as many as 9 banking companies. The data used are secondary data in the form of annual reports and company sustainability reports and the Indonesia Stock Exchange website. Data analysis technique using multiple linear regression with the SPSS program. The results of this study indicate that there is significant influence between independent commissioners and institutional ownership of financial performance, while corporate social responsibility and audit committees have no significant effect on financial performance. This shows that corporate social responsibility cannot be taken into consideration by investors in investing their capital, and the audit committee has not been able to maximize its duties in assisting the board of commissioners.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Financial Performance

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarja Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian ini merupakan sebuah karya dasar yang peneliti dapat lakukan dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang telah penulis pelajari selama ini.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, peneulis menyadari kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, meskipun segala kemampuan telah dikerahkan tetapi penulis masih merasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga bermanfaat bagi segala pihak yang membutuhkan.

Sehubungan dengan selesainya karya akhir ini karena dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Nurkholis, S.E., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
2. Dr. Sumiati, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
3. Dr. Siti Aisjah, SE., MS., CSRS. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

4. Dr. Atim Djazuli, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perhatian yang baik hingga skripsi ini terselesaikan dengan lancar.
5. Dr. Himmiyatul Amanah Jiwa Juwita., SE., MM. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan perhatian terhadap terselesaikannya penelitian ini.
6. Risna Wijayanti, SE., MM., Ph.D. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan perhatian terhadap terselesaikannya penelitian ini.
7. Keluarga tercinta Ayah, Ibu, Nenek, dan Ean yang selama ini telah memberikan dukungan baik secara moril, materil serta doa sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman HMKG yang selalu memberikan dukungan dan hiburan selama penyusunan skripsi ini.
9. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian laporan ini

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka dalam menerima saran dan kritik demi perbaikan penulisan laporan ini. Semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Malang, 11 April 2019

Muhammad Fakhrur Reza

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teori.....	17
2.2.1 Teori Keagenan.....	17
2.2.2 Teori Legitimiasi.....	19
2.2.3 Teori <i>Stakeholder</i>	21
2.2.4 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	23
2.2.4.1 Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
2.2.4.2 Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	25
2.2.4.3 Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
2.2.4.4 Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
2.2.5 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	28
2.2.5.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	28
2.2.5.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	30
2.2.5.3 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	32
2.2.5.4 Struktur <i>Good Corporate Governance</i>	33
2.2.5.5 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	34
2.2.5.6 Dewan Komisaris Independen	35
2.2.5.7 Komite Audit.....	36
2.2.5.8 Kepemilikan Institusional	37
2.2.6 Kinerja Keuangan	38
2.2.6.1 Rasio Keuangan.....	39
2.2.6.2 <i>Return on Equity (ROE)</i>	40
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	41
2.4 Kerangka Konsep Penelitian	41
2.5 Hipotesis	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	45



3.3 Populasi dan Sampel	46
3.3.1 Populasi	46
3.3.2 Sampel.....	46
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	48
3.4.1 Jenis Data	48
3.4.2 Sumber Data	48
3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Operasional	49
3.5.1 Variabel Dependen	49
3.5.2 Variabel Independen.....	50
3.6 Metode Analisis Data.....	52
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	53
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	53
3.6.3 Regresi Linear Berganda	50
3.6.4 Uji Hipotesis	56
3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
3.6.4.2 Uji F	57
3.6.4.3 Uji t	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan	58
4.1.1 PT Bank Mandiri Tbk	58
4.1.2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.....	59
4.1.3 PT Bank Negara Indonesia Tbk	59
4.1.4 PT Bank Danamon Tbk	60
4.1.5 PT Bank BJB Tbk.....	60
4.1.6 PT Bank CIMB Niaga Tbk	61
4.1.7 PT Bank BTN Tbk.....	61
4.1.8 PT Bank OCBC NISP Tbk.....	62
4.1.9 PT Bank Maybank Indonesia Tbk.....	62
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	63
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	70
4.3.1 Uji Normalitas	71
4.3.2 Uji Multikolonieritas	72
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	73
4.4 Analisis Regresi	74
4.5 Pengujian Hipotesis.....	76
4.5.1 Uji F.....	76
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
4.5.3 Uji t.....	78
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	81
4.6.1 Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan.....	81
4.6.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan.....	81
4.6.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan	82
4.6.4 Pengaruh Kepemilikan Insitusional Terhadap Kinerja Keuangan	83
4.7 Implikasi Hasil Penelitian.....	84

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	87
----------------------	----



5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu	14
3.1	Seleksi Sampel Penelitian.....	47
3.2	Daftar Perusahaan Perbankan yang Menjadi Objek Penelitian	48
4.1	Deskriptif Statistik Corporate Social Responsibility (X_1).....	63
4.2	Deskriptif Statistik Komite Audit (X_2).....	65
4.3	Deskriptif Statistik Komisaris Independen (X_3)	66
4.4	Deskriptif Statistik Kepemilikan Insitusional (X_4).....	68
4.5	Deskriptif Statistik ROE (Y)	69
4.6	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	72
4.7	Uji Multikolonieritas	73
4.8	Hasil Analisis Regresi	75
4.9	Hasil Uji F	77
4.10	Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)	78
4.11	Hasil Uji t.....	79

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	41
2.2	Kerangka Konsep Penelitian	42
4.1	Distribusi Normal Pengujian <i>Normalitas P-P Plote Regression</i>	71
4.2	Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	94
Lampiran 2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	97
Lampiran 3 Hasil Uji Hipotesis	99
Lampiran 4 Data Mentah	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam perkembangannya akan selalu berusaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Perusahaan berlomba untuk meningkatkan daya saing di berbagai sektor untuk dapat menarik minat investor untuk berinvestasi terutama dalam aspek keuangan, yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan termasuk pada perusahaan sektor perbankan. Dalam UU No. tahun 1998 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi sebagai *agent of development* (Dedy,2003).

Dalam 4 tahun terakhir, peranan perbankan nasional yang masih mendominasi sektor jasa keuangan nasional kian menurun dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan kredit anjlok sejak 2014, tercatat 11,6% di tahun 2013 dan terus menurun ke titik terendah di tahun 2016 . Merupakan hal yang tidak lazim bagi sektor perbankan karena pertumbuhan kredit selama periode 2010 – 2013 di atas 20%. Bank Indonesia sudah melakukan penurunan suku bunga acuannya secara signifikan sebesar 200 bps sepanjang tahun.

Begitupun juga pada peningkatan suku bunga acuan BI rate di tahun 2008 mencapai 9,25% berdampak pada menurunnya penyaluran kredit di pasar. Debitur akan lebih memilih pembiayaan yang mudah dan murah untuk kelangsungan bisnisnya. Rendahnya tingkat kredit dapat diartikan menurunnya tingkat pendapatan bunga bank. Hal ini disebabkan bank-bank di Indonesia merupakan bank komersil yang tugas utamanya adalah menyalurkan dana dari nasabah kepada para debiturnya. Maka dengan menurunnya tingkat pendapatan bunga bank akan menurunkan pula tingkat profitabilitas bank. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun 2013, sektor keuangan dan jasa lainnya menempati posisi kedua sektor yang memberikan kontribusi bagi PDB Indonesia. Disatu sisi, sektor keuangan terutama perbankan merupakan sektor yang paling rentan dan responsif terhadap gejolak ekonomi, namun disisi lain sektor ini memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya bagi pendapatan negara

Dalam Jumingan (2011) kinerja keuangan adalah semua gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Kinerja keuangan yang dinilai oleh perusahaan dan pemegang saham dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE). Untuk mengetahui besar dari nilai *Return On Equity* (ROE), maka perusahaan harus menganalisis kembali bagaimana kinerja keuangan pada beberapa periode tertentu pada perusahaan perbankan tersebut.

Setiap perusahaan di Indonesia khususnya pada sektor perbankan melakukan berbagai macam kegiatan terencana terkait perubahan lingkungan untuk mencapai tujuan khusus maupun tujuan umum yang telah direncanakan perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh perusahaan umumnya akan melibatkan berbagai macam pihak, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, seperti pemerintah, pemegang saham, masyarakat dan pihak eksternal lainnya. Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan dibuat oleh perusahaan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Namun jika pengelolaan perusahaan yang kurang sehat akan mengakibatkan penurunan kualitas dari kinerja perusahaan tersebut.

Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan dari *stakeholders* khususnya para pemegang saham atas *return* yang dapat diperoleh dari investasi yang mereka tanamkan. Akibatnya para pemegang saham kurang tertarik untuk berinvestasi karena pengelolaan manajemen yang kurang sehat. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham. Dalam rangka menjaga eksistensi perusahaan, maka perusahaan harus dapat menjaga keseimbangan hubungan dengan pihak lain dan melakukan mengungkapkan informasi secara terbuka mengenai perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders* yang dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan. Selain memenuhi kepentingan para investor, kinerja keuangan yang baik juga harus memenuhi kepentingan lingkungan sekitarnya.

Beberapa waktu belakangan ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi isu yang cukup sentral terutama bagi perusahaan yang ingin tetap eksis dan dapat diterima oleh masyarakat. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan akan membaik dan pada akhirnya diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat. Kesadaran perusahaan akan betapa pentingnya penerapan CSR dilakukan demi memenuhi kebutuhan para stakeholder. Sehubungan dengan laporan tahunan, laporan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Pelaksanaan dan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan diharapkan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat.

Legitimasi sosial ini yang akan meningkatkan transaksi keuangan, sehingga meningkatkan profitabilitas (Dewi *et al.*, 2004). Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan pemilik. Menurut Syahnaz 2013 pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap *image* perusahaan, sehingga akan mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan selain itu investor akan mengapresiasi hal yang berdampak terhadap nilai saham perusahaan. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap kehadiran perusahaan, seperti yang diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mewajibkan perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ditekankan kembali pada Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b, ditegaskan kembali bahwa setiap penanam modal wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi keras akan dibebankan kepada setiap penanam modal yang tidak melaksanakan praktik tanggung jawab sosial seperti sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial harus dilakukan secara merata pada seluruh aspek. Dalam melakukan CSR, perusahaan mengorbankan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dibutuhkan suatu pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk kepentingan perusahaan dan pemakai laporan keuangan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* pada sektor perbankan sering dianggap tidak penting mengingat bahwa perbankan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan apabila

dibandingkan dengan sektor lainnya seperti manufaktur dan pertambangan. Meskipun demikian, perbankan memegang peranan penting pada perekonomian suatu negara. Perbankan adalah industri yang kompetitif, sehingga apabila perusahaan melaksanakan kegiatan CSR dan melaporkannya perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Hilman dan Keim (2001) memandang CSR sebagai alat yang berguna untuk menciptakan reputasi yang baik bagi citra perusahaan dan dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan. Menurut penelitian Ahmed (2013) yang meneliti praktik CSR dari Southeast Bank Ltd. - PCB di Bangladesh, menemukan bahwa bank melaksanakan program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, masalah lingkungan, olahraga dll. Namun, biaya tertinggi yang dikeluarkan bank adalah untuk program pendidikan melalui program beasiswa.

Keterlibatan masyarakat dipandang sebagai dasar dari semua inisiatif kebijakan CSR yang telah dilakukan dan harus diperluas, bukan hanya untuk kegiatan amal biasa. Menurut Dorasamy (2013) kegiatan CSR pada negara berkembang akan mendapatkan respon yang lebih baik karena masyarakat menuntut dukungan yang lebih besar pada masalah sosial dan lingkungan seperti daur ulang dan limbah manajemen, program dukungan kesehatan, dan dana sponsor untuk komunitas. Menurut Daniri dalam Riswari dan Cahyonowati (2012), CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja, tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan.

Sehingga CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan melaksanakan CSR citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas stakeholders semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas *stakeholders* dalam waktu yang lama, maka kinerja keuangan perusahaan juga dapat meningkat.

Setelah melakukan *Corporate Social Responsibility*, pencapaian keberhasilan perbankan dalam mengatur kinerja keuangan tentu membutuhkan sistem dan kebijakan yang ditetapkan dalam tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Peraturan OJK saat ini banyak mengaitkan dengan pelaksanaan GCG di sektor keuangan. GCG mengatur bagaimana hubungan antara manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya agar sistem di dalam perbankan dapat berjalan secara efektif (Greuning *et al*, 2011). GCG diperlukan untuk memberikan perusahaan suatu hasil kinerja yang baik dalam ukuran jangka panjang. Rimardhani *et al* (2016) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus mementingkan shareholder, maka diperlukan GCG supaya dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan secara baik.

GCG dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), yaitu berupa perlindungan terhadap pemegang saham dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Sebagai pengelola, manajemen memiliki kewajiban untuk menginformasikan kondisi perusahaan kepada pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Dengan adanya GCG perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem yang efektif dan lebih baik dalam

pengelolaan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. GCG merupakan suatu mekanisme yang memiliki kemampuan pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi keuangan yang berkualitas.

Perusahaan tentunya harus memastikan kepada para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholder dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sedangkan dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006).

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi banyak hal, contohnya komite audit, proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Dengan adanya mekanisme GCG ini diharapkan *monitoring* terhadap manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi jika perusahaan menerapkan sistem GCG diharapkan kinerja tersebut akan meningkat menjadi lebih baik, dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari

nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan akan tercapai. *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memberikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi kinerja keuangan maupun perusahaan secara menyeluruh.

Kententuan tentang tata kelola perusahaan yang baik tersebut (terutama) ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik (Siswanto dan Aldridge, 2005). Dalam penelitian ini tidak meneliti konsep GCG secara menyeluruh, melainkan hanya meneliti mekanisme dari GCG.

Komisaris independen menjadi salah satu mekanisme keberhasilan GCG. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, istilah komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya (investor). Saat ini hampir semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah memiliki komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan. Arif (2013) mengatakan komisaris independen sangat penting untuk dimiliki oleh perusahaan, dikarenakan adanya komisaris independen akan memberikan tekanan kepada dewan komisaris agar bertindak objektif tanpa adanya benturan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham perusahaan.

Mekanisme GCG selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Hanafi dalam Rizky (2013) mengatakan semakin tinggi kepemilikan intitusional suatu perusahaan maka akan semakin meningkat pengawasan pihak eksternal pada perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam melakukan monitor terhadap manajemen karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Rizky, 2013).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji hubungan pengaruh mekanisme GCG dan CSR terhadap kinerja keuangan pada perusahaan, dalam penelitian Agung (2016) meneliti pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Rachma (2016) menunjukkan hasil bahwa dari mekanisme *good corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang tercermin pada *return on equity* (ROE). Penelitian Firli (2015) meneliti pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan dan *Earning Response Coefficient* (ERC) pada perusahaan pertambangan. Hasil ini menemukan bahwa pengungkapan CSR akan meningkatkan kepercayaan investor untuk memberikan utang kepada perusahaan, sehingga akan meningkatkan ROE. Dalam penelitian Khansa (2017) meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja

keuangan perbankan pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan mekanisme proporsi komisaris independen dapat meningkatkan kinerja keuangan, dan peningkatan kinerja keuangan dapat terjadi dengan adanya penerapan mekanisme kepemilikan institusional dan komite audit diukur dengan ROA. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul : ***Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).***

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengelola perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi untuk memilih perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang baik dilihat dari pengungkapan CSR dan GCG.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang sama.



Dimensi GCG dalam penelitian ini menggunakan variabel struktur dewan komisaris (Arif, 2013), komisaris independent (Yemima, 2016; Rizky, 2013), dan kepemilikan manajerial (Alfin, 2011). Berdasarkan adanya fenomena mengenai pentingnya CSR dan dimensi GCG terhadap profitabilitas perusahaan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh *Coporate Social Responsibility* dan Dimensi *Good Coporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI”.

Dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme GCG yang harus dimiliki oleh perusahaan di Indonesia. Cahyaningsih dan Martina (2011) mengatakan dewan komisaris sebagai organ perusahaan merupakan mekanisme yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris membuat keputusan yang dihasilkan oleh manajemen menjadi objektif serta dapat meminimalisir *moral hazard* yang kemungkinan dilakukan oleh manajemen.

Dalam penelitian Arif (2013) yang meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan dan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yemima (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komisaris independen terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2013) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Rizky (2013) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Rachma (2016) meneliti pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* (GCG) yaitu proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang tercermin pada *return on equity* (ROE). Sedangkan untuk variabel komite audit, kepemilikan manajerial dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang tercermin pada *return on equity* (ROE).

Agung (2016) meneliti Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada perusahaan Perbankan yang Go-public di BEI Indonesia tahun 2012-2014. *Good Corporate governance* yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan Institusional. Indikator kinerja keuangan diukur melalui *return on equity* (ROE) dan *return on assets* (ROA). Penelitian ini penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

Firli (2015) meneliti Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Earning Response Coefficient (ERC) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 2012-2013. Hasil pengujian ini menemukan bahwa pengungkapan CSR akan meningkatkan kepercayaan investor untuk memberikan utang kepada perusahaan, sehingga akan meningkatkan ROE. Sebaliknya, pengungkapan CSR tidak berdampak terhadap ROA dan ERC.

Khansa (2017) meneliti Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Periode 2013-2015 yang diukur dengan ROA dan ROE. Sampel penelitian menggunakan 24 perbankan yang terdaftar di BEI yang menggunakan GCG dengan total data observasi sebanyak 72 data. mekanisme *Good Corporate Governance* adalah proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan Institusional. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan mekanisme proporsi komisaris independen, dapat meningkatkan kinerja keuangan baik diukur menggunakan ROA maupun ROE, Berdasarkan pengukuran ROA, peningkatan kinerja keuangan dapat terjadi dengan adanya penerapan mekanisme kepemilikan institusional dan komite Audit.

Syahnaz (2013) membahas pengaruh kegiatan CSR terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. ROA, ROE, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan sebagai proksi kinerja keuangan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh pada ROA dan ROE.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil	Sumber
1.	pengaruh mekanisme GCG dan pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mekanisme <i>good corporate governance</i> yaitu proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang tercermin pada <i>return on equity</i> (ROE). 2. variabel komite audit, kepemilikan manajerial dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang tercermin pada <i>return on equity</i> (ROE). 	Penelitian terdahulu, Rachma (2016)

Tabel 2.1 Lanjutan Penelitian Terdahulu

2.	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada perusahaan Perbankan yang Go-public di BEI Indonesia tahun 2012-2014.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan antara proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap kinerja keuangan proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 	<p>Penelitian Terdahulu Agung Setya Putra (2016)</p>
3.	<p>Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan <i>Earning Response Coefficient (ERC)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan CSR tidak meningkatkan kinerja keuangan, dalam hal ini ROA 2. Pengungkapan CSR meningkatkan kinerja keuangan, dalam hal ini ROE 3. Pengungkapan CSR tidak meningkatkan ERC 	<p>Penelitian terdahulu Firli (2015)</p>

Tabel 2.1 Lanjutan Penelitian Terdahulu

4.	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris indenpedensi dapat meningkatkan kinerja keuangan baik diukur dengan ROA maupun ROE 2. Kepemilikan Institusional dan Komite Audit dapat meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA 3. Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE namun tidak dengan ROA. 	<p>Penelitian terdahulu, Khansa (2017)</p>
5.	<p>Pengaruh Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coporate Social Responsibility</i> pada perusahaan memiliki positif efek terhadap <i>Return on Asset</i> 2. <i>Coporate Social Responsibility</i> pada perusahaan memiliki positif efek terhadap <i>Return on Equity</i> 3. <i>Coporate Social Responsibility</i> pada perusahaan tidak memiliki positif efek terhadap <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> 	<p>Penelitian terdahulu, Syahnaz (2013)</p>

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar yang dapat dijadikan alat untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah “suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent”. Baik maupun agent diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata – mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agent. Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Tujuan utama dari teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisasi biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Darmawati, dkk. (2005) mengatakan terdapat tiga asumsi yang melandasi teori keagenan yaitu asumsi sifat manusia, asumsikeorganisasian, dan asumsi informasi.

1. Asumsi Sifat Manusia

Asumsi ini menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), keterbatasan rasional (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi Keorganisasian

Asumsi ini menekankan mengenai adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas, dan adanya asimetri informasi antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen).

3. Asumsi Informasi

Asumsi ini mengemukakan bahwa informasi dianggap komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Elemen kunci dari teori ini bahwa prinsipal dan agen memiliki perbedaan preferensi atau tujuan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada saat prinsipal dan agen yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda yakni masing-masing menginginkan bertambahnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi keduanya, oleh karenanya munculah konflik antara prinsipal dan agen. Pemegang saham (prinsipal) lebih menginginkan untuk memaksimalkan laba perusahaan dan nilai perusahaan dari investasinya, sedangkan manajer (agen) menginginkan untuk memaksimalkan kompensasinya (Awan, 2014).

Terdapat langkah yang telah dikemukakan oleh Moeinaddin dan Karimianrad (2012) untuk meminimalisir masalah keagenan adalah dengan penerapan GCG. Penerapan GCG ini sebagai bentuk pengawasan perusahaan untuk meminimalisir masalah keagenan yang terjadi antara prinsipal dan agen, karena tanpa adanya pengawasan ini dapat membuka peluang bagi manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham (prinsipal). Menurut Midiastuty dan Machfoedz dalam (Rizky, 2013), perlakuan manipulasi konflik kepentingan ini dapat diminimumkan melalui

mekanisme *monitoring* yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan kepentingan tersebut, yaitu:

1. Memperbesar kepemilikan saham oleh manajemen, sehingga kepentingan pemegang saham dapat disejajarkan dengan kepentingan dari manajemen.
2. Kepemilikan saham oleh investor institusi. Moh'd *et al.* (dalam Midiastuty dan Machfoedz, 2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat melakukan monitor terhadap manajemen dengan kepemilikannya yang besar. Selain itu investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investors* yang tidak mudah “terbodohi” oleh tindakan manajer.
3. Melalui *monitoring* dewan direksi (*board of directors*). Beberapa penelitian empiris telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara peran dewan direksi dengan pelaporan keuangan. Ditemukan bahwa ukuran dan independensi dewan direksi mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor pelaporan keuangan.

2.2.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

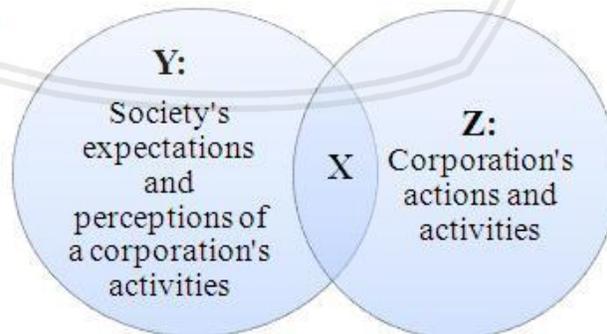
Gray *et al.* (1996) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran masyarakat dan lingkungan, perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik produk, metode, dan tujuan. Deegan *et al.* (2002) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

O'Donovan (2002) memberikan ilustrasi posisi legitimasi dan senjangan legitimasi antara perusahaan dan *stakeholder*, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Posisi Legitimasi dan Senjangan Legitimasi

Fig.1 Adapted from (O'Donovan, 2002)



Sumber: Gary O'Donovan (2002)

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada wilayah X merupakan kesesuaian antara aktivitas perusahaan (*corporate activities*) dengan pengharapan masyarakat (*society's expectations*), termasuk kesesuaian pada nilai sosial dan norma. Sedang wilayah Y dan Z merupakan ketidaksesuaian antara operasi perusahaan (*corporation's actions*) terhadap persepsi masyarakat (*legitimacy gap*). Pengurangan senjangan legitimasi dapat dilakukan dengan jalan memperlebar wilayah X lewat strategi legitimasi, seperti dengan cara meningkatkan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dan memperluas pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial (*social disclosure*) sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan aktivitas perusahaan, atas berbagai dampak yang ditimbulkan (O'Donovan, 2002). Tingginya senjangan legitimasi sebagai akibat ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan terhadap ekspektasi masyarakat memunculkan tekanan dari *stakeholder*.

2.2.3 Teori Stakeholder

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik saham (*shareholder*) sebagaimana yang terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya yang disebut sebagai tanggung jawab sosial (*social responsibility*). fenomena seperti itu terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2012).

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung ataupun tidak langsung oleh perusahaan (Noor, 2011). Dalam Luk *et al.* (2005) menyatakan

bahwa *stakeholder is a group or an individual who can effect, or be effected by, the success or failure of an organization*. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal atau eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan, pekerja perusahaan, dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Hummels (dalam Noor, 2011) memaparkan pengertian *stakeholder* sebagai berikut:

“Stakeholder are individuals and group who have legitimate to claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization’s practices, policies and actions”.

Batasan *stakeholder* tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung dan tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder*.

Jones *et al.* (1999) menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi, antara lain:

1. *The corporation has relationship with many constituency groups (stakeholder) that effect and are affected by its decisions* (Freemanm, 1984).
2. *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both process es and outcomes for the firm and irs stakeholder.*

3. *The interests of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set of interests is assumed to dominate the others* (Clakson, 1995; Donaldson & Preston, 1995).
4. *The theory focuses on managerial decision making* (Donaldson & Preston, 1995).

Berdasarkan pada asumsi dasar tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Adam, 2002).

Esensi teori *stakeholder* diatas jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat sekitar guna meningkatkan legitimasi masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung berorientasi terhadap *shareholder*, kearah memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*).

2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) mendefinisikan bahwa praktik *Corporate Social Responsibility* adalah :

"Corporate Social Responsibility is commitment of business to contribute to sustainable development working with employees and their representatives, the local community and society to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development."

Definisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah komitmen bisnis yang berperan dalam pembangunan ekonomi yang dalam pekerjaannya mengikutsertakan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas untuk memperbaiki kualitas hidup, dengan cara yang baik bagi bisnis maupun pengembangannya. Sedangkan menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan dan aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu perilaku yang terbuka dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memerhatikan ekspektasi para pemangku kepentingan, tunduk kepada hukum yang berlaku dan berkomitmen dengan norma perilaku internasional dan diintegrasikan ke dalam seluruh bagian organisasi.

Bambang dan Melia (2013) berpendapat bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menangani keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif

pada masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain). Sehingga, *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen bisnis yang berperan dalam pembangunan ekonomi yang aktivitasnya berkaitan langsung dengan masyarakat dan lingkungan, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

2.2.4.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Crowther David (2008) dalam Hadi (2011) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu:

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. *Sustainability* berputar pada kerberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.
2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan.

3. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

2.2.4.3 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Menurut Wibisono (2007) menjelaskan tentang manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR, yaitu :

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas.
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas.
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*). Hal ini menunjukkan bahwa praktik CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan yaitu meningkatkan legitimasi *stakeholder* sehingga akan berimbas pada kinerja keuangan.

2.2.4.4 Bentuk *Corporate Social Responsibility*

Di kalangan sebagian dunia usaha, telah tumbuh pengakuan bahwa keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan di mana perusahaan mereka beroperasi. Untuk mewujudkan tanggung jawab semacam itu, dunia usaha diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh CSR dalam aktivitas usahanya. Pada intinya, CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah “*triple bottom line*” (Isa dan Busyra, 2008).

Dalam *Business & Biodiversity* pada *The World Business Council for Sustainable Development* tahun 2002 menjelaskan dalam implementasinya secara ringkas bentuk dari CSR ini dapat digolongkan dalam 4 bentuk yaitu:

1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan diwujudkan secara umum melalui program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandirian bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.
3. Penangan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air,

kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai cerita yang positif (*corporate image*).

Melihat semua bentuk CSR tersebut, perusahaan perlu melakukan hal itu semua semata-mata untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, harus dianggap sebagai bagian dari investasi. Semua itu bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu berusaha untuk menghasilkan keuntungan dan bertahan lama. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa CSR meliputi semua dimensi dari dampak, hubungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

2.2.5 Good Corporate Governace (GCG)

2.2.5.1 Pengertian Good Corporate Governance

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan *Cadbury Comitte* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan *cadbury report*. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut mereka *good corporate governance* merupakan sebuah prinsip yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders*. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk pengaturan dari kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001 di dalam Hadianto (2013) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut *The Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) di dalam Hadianto (2013), *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka kepada pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. Pengertian lain datang dari *Finance Comitte on Corporate Governance* Malaysia, menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap

memerhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya. Berdasarkan berbagai definisi mengenai GCG diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG merupakan suatu sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan dengan baik guna menciptakan keselarasan antara seluruh pihak yang terlibat dalam eksistensi perusahaan yang bertujuan menjamin kelangsungan perusahaan dan menjaga tanggungjawab terhadap pemegang saham.

2.2.5.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), yang dikutip oleh FCGI dalam terbitannya, ada lima hal penting yang digunakan untuk menilai *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. (*Indepedency*) Prinsip yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*), termasuk dalam memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta mendorong anggota perusahaan untuk ikut melaksanakannya. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*)
2. (*Transparency*) Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu

dan akurat, termasuk informasi tentang proses merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk melaksanakannya. Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan yang akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua hal sangat penting adanya bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

3. (*Accountability*) Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar, termasuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk dapat ikut melaksanakannya.
4. (*Responsibility*) Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya proses perumusan, implementasi serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melaksanakannya. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

5. (*Fairness*) Kewajaran memberikan porsi yang adil dan sama rata dalam hal memenuhi setiap hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya prinsip-prinsip pada *corporate governance* ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah sebagai regulator dalam membangun framework bagi penerapan *good corporate governance*. Bagi para pelaku usaha sendiri, prinsip-prinsip ini juga bisa menjadi pedoman dalam meningkatkan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan (Pranata, 2007). Prinsip-prinsip GCG ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu tingkatan, melarang praktik-praktik *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

2.2.5.3 Manfaat Good Corporate Governance

Manfaat corporate governance yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), (2012) adalah sebagai berikut:

1. Kinerja perusahaan yang meningkat karena adanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga operasional perusahaan terjamin lebih efisien serta pelayanan kepada *stakeholders* meningkat.
2. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

2.2.5.4 Struktur *Good Corporate Governance*

Keberadaan struktur dalam organisasi lebih ditekankan pada bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi. GCG sebagai suatu struktur dimaknai bahwa elemen-elemen yang membentuk GCG (dewan komisaris, komite audit, direksi dan pemegang saham) berperan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing (Hadianto, 2013).

Desain struktur CG berkaitan dengan model sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Negara-negara yang menganut model hukum Anglo-Saxon, struktur CG tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi, model ini dikenal dengan single board system. Perusahaan-perusahaan di Inggris, Amerika dan negara-negara lain yang menganut sistem ini struktur *corporate governance* nya terdiri dari RUPS, *board of directors* (representasi dari pemegang saham) dan executive managers (merupakan pihak manajemen yang menjalankan aktivitas operasi perusahaan).

Bagi negara-negara *Continental Europe*, struktur CG disebut dengan *two board system* yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Manajer Eksekutif (selaku pihak manajemen). Dalam *two board system* secara tegas adanya pemisahan keanggotaan dewan yaitu keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi selaku pihak yang mengelola perusahaan (eksekutif). RUPS adalah struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Dewan komisaris memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi dalam mengelola

perusahaan. Di Indonesia , struktur CG diatur dalam UU PT no. 40 tahun 2007. Secara umum, perusahaan-perusahaan di Indonesia struktur CG berbasis *two board system*.

Perbedaan mendasar terletak pada kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi direksi. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU PT no. 40 tahun 2007 bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 94 ayat 1 dan pasal 105 ayat 1). Selain itu, kedudukan anggota dewan komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 111 ayat 1). Dengan demikian, maka baik anggota direksi maupun anggota dewan komisaris bertanggungjawab pada RUPS. Struktur CG yang menempatkan dewan komisaris dan dewan direksi sejajar berdampak pada kurang efektifnya fungsi pengawasan karena dewan direksi beranggapan sebagai mitra kerja.

2.2.5.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme dalam pengawasan *good corporate governance* dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan eksternal (Lastanti; 2004). Mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara mempengaruhi perusahaan dengan cara lain selain mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pasar. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan struktur kepemilikan (Arifani,2013).

2.2.5.6 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan. Menurut Herawati (2008), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan anggota dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan dengan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi unsur independensi. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris (Aprianingsih, 2016).

Jumlah anggota dewan komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

2.2.5.7 Komite Audit

Komite audit menurut peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep.29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan defeni tersebut, dapat diketahui bahwa komite audit yang bertugas mengawasi keefektifan operasional perusahaan yang bertanggungjawab terhadap dewan komisaris.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), (2012) tanggungjawab komite audit adalah pengawasan secara menyeluruh terhadap :

1. Laporan keuangan, bertanggungjawab pada pelaksanaan independen terhadap laporan keuangan yang dibuat manajemen yang memberikan gambaran sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komite perusahaan jangka panjang.
2. Pengawasan kontrol, bertanggungjawab untuk pengawasan terhadap masalah yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.
3. Tata kelola Perusahaan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan.

Jumlah komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dalam memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat, perusahaan yang produk dan jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, maka komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan (KNKG, 2006)

2.2.5.8 Kepemilikan Institusional

Menurut Gudono (2012), kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan kepemilikan institusional terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan, investasi dan lainnya. Marselina (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga eksternal. Kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan yang baik oleh para investor institusional sehingga semakin semakin besar kepemilikan institusi, maka semakin besar pula pengawasan terhadap pihak manajemen.

2.2.6 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2010). Menurut Praningrum (2012) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah hasil analisis atas data keuangan operasional perusahaan untuk memastikan apakah proses operasional telah berjalan efektif dan efisien.

Rasio keuangan dirancang untuk mengevaluasi laporan keuangan, yang berisi data tentang posisi perusahaan pada suatu titik dan operasi perusahaan pada masa lalu. Nilai nyata laporan keuangan terletak pada fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memperkirakan pendapatan dan dividen masa yang akan datang. Rasio keuangan yang merupakan bentuk informasi akuntansi yang penting bagi perusahaan selama suatu periode tertentu.

Berdasarkan rasio tersebut, dapat dilihat keuangan yang dapat mengungkapkan posisi, kondisi keuangan, maupun kinerja ekonomis di masa depan dengan kata lain informasi akuntansi. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis laporan keuangan. Analisis rasio adalah salah satu alat analisis keuangan yang paling populer. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja perusahaan (Subramanyam, 2014).

2.2.6.1 Rasio Keuangan

Jenis-jenis Rasio Keuangan Menurut Brigham & Houston (2010) analisis rasio keuangan terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Dapat diartikan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh tempo. Aset likuid merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversikan dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku.

2. Rasio Manajemen Aset

Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengelola asetnya. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak aset, maka biaya modalnya terlalu tinggi dan labanya akan tertekan. Di lain pihak, jika aset terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan akan hilang.

3. Rasio Manajemen Utang

Rasio solvabilitas atau financial leverage ratio menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*).

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil

operasi. Rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional.

5. Rasio Nilai Pasar

Rasio nilai pasar merupakan rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan indikasi pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang baik oleh investor adalah perusahaan dengan laba dan arus kas yang aman serta terus mengalami pertumbuhan.

2.2.6.2 Return on Equity (ROE).

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu diketahui. (Hery,2016:193).

Brigham dan Houston (2010) menyatakan bahwa ROE merupakan rasio yang paling penting. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham. Dengan demikian variabel kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROE. Dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan modal dari pemegang saham secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba. Dengan adanya peningkatan laba bersih maka nilai ROE akan

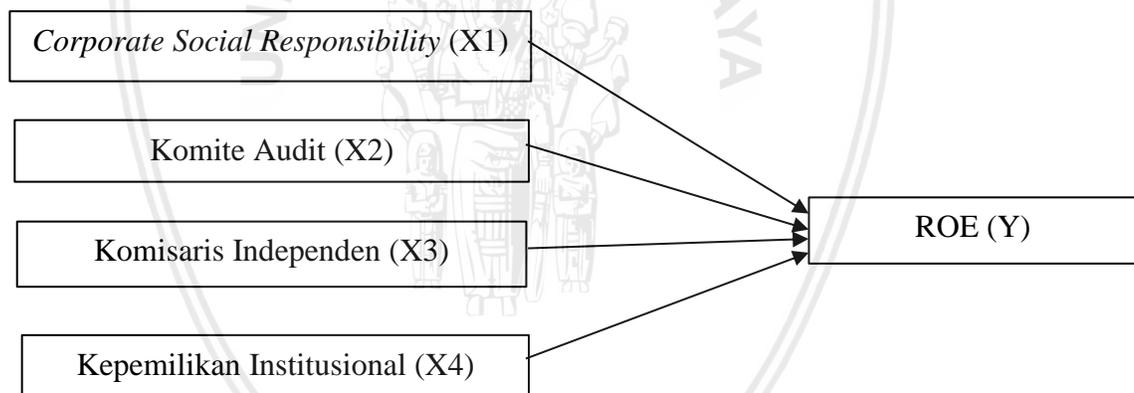
meningkat pula sehingga para investor tertarik untuk membeli saham tersebut yang akhirnya harga saham perusahaan akan mengalami kenaikan. Rumus untuk mencari *return on equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

Hasil Pengembalian Ekuitas

$$= \frac{\text{Pendapatan Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Modal}}$$

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

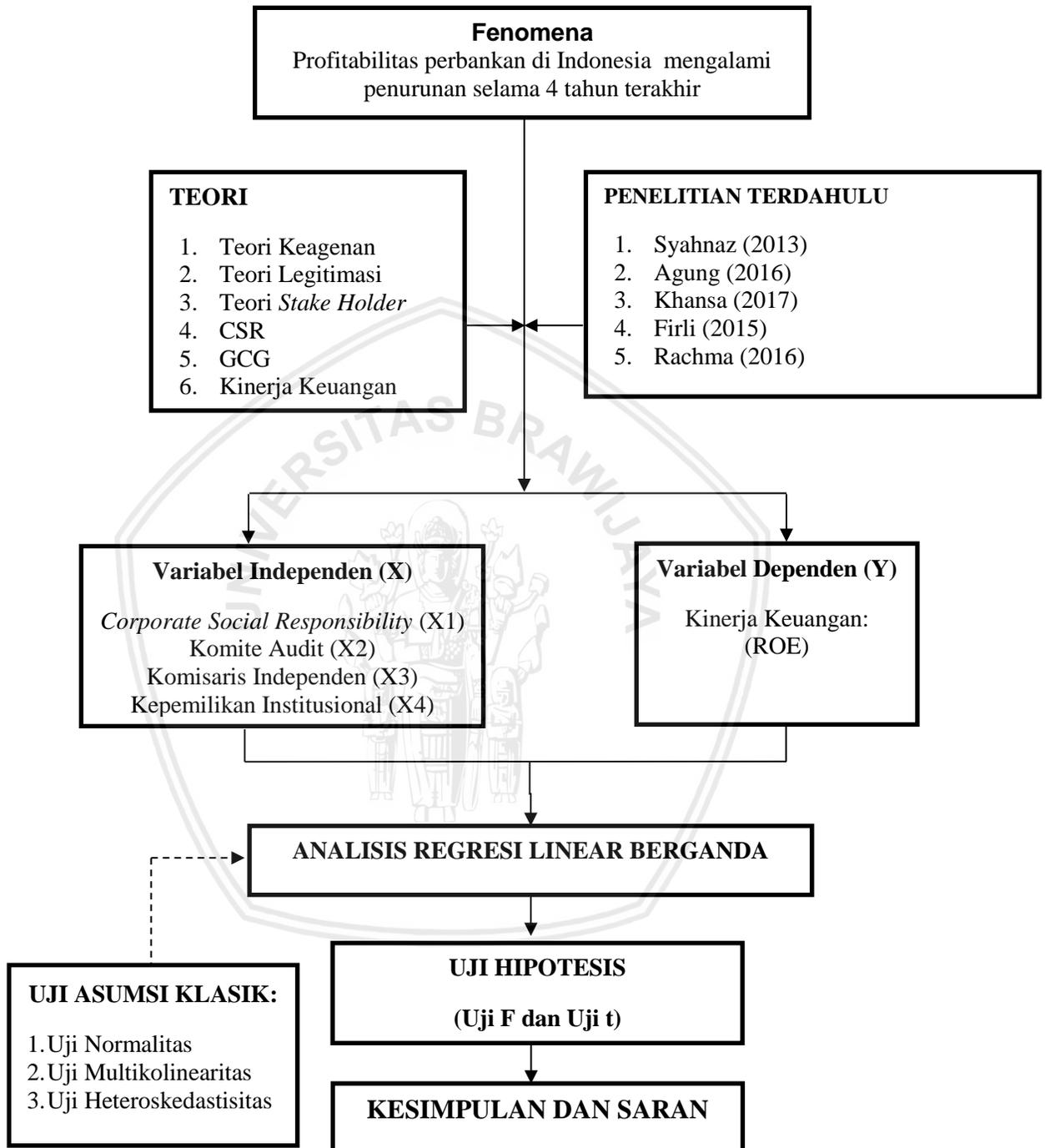
Berdasarkan uraian landasan teori di atas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka konsep yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan sebagai berikut:



2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori di atas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka pikir yang digunakan untuk memudahkan pemahaman yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Hipotesis

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari variabel komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional diharapkan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka bisa dibuat model dan hipotesis. Dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Hipotesis pertama adalah bagaimana hubungan pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Pengungkapan CSR diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian yang mengaitkan antara pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan diungkapkan oleh antara lain Syahnaz (2013), penelitian ini masing-masing menunjukkan pengaruh positif antara CSR dengan kinerja keuangan. Secara teoritis dan empiris laporan pertanggung jawaban sosial penting bagi perusahaan untuk membangun citra dan menjaga reputasi, serta legitimasi investor. Perusahaan akan berusaha untuk memperluas cakupan pengungkapan CSR, agar masyarakat dan investor percaya pada perusahaan sehingga perusahaan dapat mendukung kinerja keuangan yang baik.

H₂ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Agung (2016) meneliti keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan

pihak eksternal, sehingga komite audit dipandang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan tersebut. Komite audit mampu melindungi kepentingan para pemegang saham dari kecurangan yang dapat dilakukan pihak manajemen karena komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi kredibilitas dan integrasi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan.

H₃ : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independensi. Keberadaan komisaris independensi diharapkan dapat bersikap normal dan mampu mengurangi penyalahgunaan kewenangan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya Agung (2016) dan Khansa (2017) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh Komisaris independensi terhadap kinerja keuangan.

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Agung (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil memperjelas bahwa, semakin besar kekuatan suara dan dorongan pihak institusi untuk mengawasi manajemen sehingga memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan yang akan berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan. Kepemilikan institusi di sebuah perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan. Sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Menurut Sugiyono (2012:21) penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Sedangkan karakteristik penelitian ini bersifat pengembangan, karena penelitian ini menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk dihubungkan dengan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan dengan menggunakan ROE sebagai alat ukur kinerja keuangan.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE). *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki beberapa faktor yang akan mempengaruhi kinerja keuangan, yaitu komite audit, proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

3.3 Populasi dan Sample

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari orang, event, atau suatu topik yang akan diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2013). Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Peneliti menggunakan populasi 43 perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada yang menyajikan data laporan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan laporan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam laporan tahunannya. Periode pada penelitian ini menggunakan periode terbaru yaitu 2013-2016.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi (sekaran, 2013). Sampel harus dapat memberikan gambaran yang tepat dari suatu populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012) pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu dari peneliti. Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

2. Mempublikasikan laporan tahunan selama empat tahun berturut-turut mulai periode 2013-2016.
3. Menyediakan informasi untuk perhitungan ROE perusahaan pada laporan tahunan selama empat tahun berturut-turut mulai periode 2013-2016.
4. Mengungkapkan data mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) selama empat tahun berturut-turut mulai periode 2013-2016.
5. Mengungkapkan data mengenai proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional pada laporan tahunan selama empat tahun berturut-turut mulai periode 2013-2016.

Berdasarkan laporan kinerja keuangan perusahaan yang di publikasikan oleh idx.co.id, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 43 perusahaan. Perusahaan tersebut diseleksi kembali sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Seleksi sampel penelitian disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2016	43
2.	Perusahaan Perbankan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan selama empat tahun berturut-turut mulai periode 2013-2016	(6)
3.	Perusahaan Perbankan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel mekanisme GCG dan CSR	(28)
Total Sampel Penelitian		9
Total Pengamatan (9 x 4 tahun)		36

Berdasarkan tabel kriteria diatas, jumlah sample yang dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 9 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan total pengamatan selama 4 tahun menghasilkan total 36 data perusahaan.

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan Perbankan yang Menjadi Obyek Penelitian

No.	Kode Entitas	Nama Entitas
1.	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk.
2.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk.
3.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
4.	NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk.
5.	BDMN	PT Bank Danamon Tbk.
6.	BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
7.	BBTN	PT Bank BTN Tbk.
8.	BJBR	PT Bank BJB Tbk.
9.	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Sumber: Data diolah, 2019

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2010:15) adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data penelitian menurut Sekaran, Uma (2013) terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada

informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sedangkan data sekunder menurut adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber data yang sudah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data secara tidak langsung melalui perantara yang dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari website perusahaan serta pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diunduh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran operasional

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas yaitu ROE. Rasio profitabilitas digunakan untuk dapat mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menghasilkan laba menggunakan aset dan mengelola operasionalnya (Ross, 2009).

1. Return on Equity (ROE)

ROE adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri kasmir (2015). Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini,

semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rasio Profitabilitas yang digunakan yaitu Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity/ROE*). Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, rumus untuk mencari *return on equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Pendapatan Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Modal}} \times 100$$

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan penelitian atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional.

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan komitmen bisnis perusahaan yang berperan dalam pembangunan ekonomi yang aktiitasnya berkaitan langsung dengan masyarakat dan lingkungan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Variabel ini diukur dengan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI), cara yang digunakan untuk mengukur CSRI dilakukan dengan melihat setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan.

Kemudian skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan, rumus perhitungan CSRI adalah sebagai berikut (Haniffa, 2005) :

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

$CSRI_j$: *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan

n_j : Jumlah item untuk perusahaan

$\sum X_{ij}$: *dummy variabel*, 1 = jika diungkapkan, 0 = jika tidak diungkapkan

2. Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang terdiri dari 3 atau lebih anggota yang bukan bagian dari manajemen untuk melakukan pengujian dan penilaian atas kewajaran laporan yang dibuat oleh perusahaan namun komite audit bertugas untuk mengawasi dan melakukan pengelolaan perusahaan. Pengukuran variabel komite audit adalah dengan melihat jumlah anggota komite audit yang terdapat di perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Good corporate governance dapat diukur dengan menghitung dewan komisaris independen. Komisaris independen adalah proporsi anggota dewan komisaris dari luar pemegang saham perusahaan yang tidak terafiliasi dan bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi unsur independensi. Peraturan pencatatan di BEI Nomor: Kep-

00001/BEI/01-2014 telah mewajibkan perusahaan yang tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan. Pengukuran variabel dewan komisaris indenpendensi adalah :

Proporsi dewan Komisaris Independen

$$= \frac{\text{Anggota dewan komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham terbesar oleh investor institusi yang bukan manajemen perusahaan, yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi. Rumus mengukur kepemilikan kepemilikan institusional adalah :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total saham Institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan analisis terhadap penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan melakukan perhitungan dengan metode statistik dengan bantuan program SPSS. Analisis penelitin ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh dari CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE. Untuk mengetahui hubungan positif ataupun sebaliknya antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2013) Statistik deskriptif merupakan metode mengatur, merangkum dan mempresentasikan data dengan cara yang informatif. Metode statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data dalam penelitian. Metode ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*), Standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness untuk menggambarkan analisis statistik deskriptif.

3.6.2 Uji Asumsi klasik

Model regresi dapat dipakai dan digunakan untuk melakukan pengujian jika memenuhi persyaratan uji asumsi klasik Regresi berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai hasil yang tidak bias (Sanusi, 2011). Uji Asumsi Klasik adalah pengujian untuk memberikan kepastian bahwa tidak terjadi bias dalam penelitian dan menggambarkan bahwa model regresi tersebut *fit* atau layak digunakan. Metode yang dilakukan oleh penelitian adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data yang dimiliki dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas kolmogorov-smirnov. Pengujian dengan metode kolmogorov-smirnov akan dinyatakan berdistribusi normal jika probabilitas lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) maka residual tidak memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen terjadi saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Variabel ortogonal merupakan nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013).

Untuk menilai ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a) Nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika korelasinya cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka ada indikasi bahwa adanya multikolonieritas
- c) Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/ \text{tolerance}$). Nilai yang menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik plot antara prediksi variabel dependen (*Z-PRED*) dengan residualnya (*S-RESID*). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (*Y* prediksi – *Y* sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2013). Dasar yang digunakan dalam menganalisa heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Pengujian hipotesis untuk analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Keuangan Perusahaan
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien dari setiap variabel
 X_1 = *Corporate Social Responsibility* (CSR)
 X_2 = Komite Audit
 X_3 = Komisaris Independen
 X_4 = Kepemilikan Institusional

3.7 Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian. Perhitungan statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2013).

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan pengaruh variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), komite audit, komisaris independen dan kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan. Nilai batas koefisien determinasi pengujian ini adalah $0 < R^2 < 1$. Apabila bernilai 1, maka menunjukkan terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika koefisien bernilai 0, maka menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Santosa, 2012).

3.7.2 Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dengan ketentuan yaitu :

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti semua variabel independen bersama sama merupakan variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti semua variabel independen secara bersama-sama bukan merupakan variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3 Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan uji t adalah jika nilai probabilitas statistik t lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Periode penelitian tahun 2013 sampai dengan 2016 yang memiliki kelengkapan data variabel mekanisme GCG dan variabel CSR untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan kriteria sampel yang ada didapat 9 perusahaan, periode penelitian 4 tahun, sehingga terdapat 36 sampel. Berikut ini gambaran umum perusahaan perbankan yang dijadikan obyek penelitian.

4.1.1 PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI)

Bank Mandiri (IDX: BMRI) adalah bank yang didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan *prudential banking & best-practices risk management*.

4.1.2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI)

Bank Rakyat Indonesia (IDX: BBRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang pada awalnya didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp En Spaarbank der Inlandsche Hoodfen* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto” pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% milik Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah RI memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan public dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

4.1.3 PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI)

Bank Negara Indonesia atau BNI (IDX: BBNI) adalah sebuah institusi bank milik pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. PT Bank Negara Indonesia Tbk., didirikan oleh Margono Djojohadikusumo yang merupakan anggota BPUPKI, lalu mendirikan bank sirkulasi/sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI.

4.1.4 PT Bank Danamon Tbk. (BDMN)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) didirikan pada tahun 1956 sebagai Bank Kopra Indonesia dan pada tahun 1976 berubah nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank Danamon dan kini telah tumbuh berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia dipandu oleh visi perusahaan yaitu “Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan”.

Bank Danamon melayani seluruh segmen nasabah mulai dari Konsumer, Komersial, termasuk Usaha Kecil dan Menengah, nasabah Mikro, serta Enterprise (Komersial dan Korporasi), dengan rangkaian produk dan jasa perbankan dan keuangan yang komprehensif, termasuk layanan perbankan Syariah.

4.1.5 PT Bank BJB Tbk. (BJBR)

Bank BJB (dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten) adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menjadi bank devisa sejak tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memenuhi permintaan masyarakat akan terselenggaranya jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia Nomor 2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, terhitung sejak tanggal 15 April 2000, Pada bulan Juli 2010, Bank BJB menjadi BPD pertama di Indonesia yang melantai saham di Bursa Efek Indonesia.

4.1.6 PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)

PT Bank CIMB Niaga Tbk atau yang lebih dikenal dengan CIMB Niaga kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai bank swasta nasional dengan nama Bank Niaga. Pada tahun 1974, Bank Niaga merevisi rencana usahanya dengan berganti menjadi bank umum. Pada bulan Mei 2008, Bank Niaga resmi berubah nama menjadi Bank CIMB Niaga.

Dalam rangka memenuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang ditetapkan Bank Indonesia, Khazanah Nasional Berhad sebagai pemilik saham mayoritas Lippo Bank dan juga saham pengendali Bank Niaga (melalui CIMB Group), melakukan penggabungan (merger) kedua bank tersebut secara resmi pada tanggal 1 November 2008 yang diikuti dengan pengenalan logo kepada masyarakat luas.

4.1.7 PT Bank BTN Tbk. (BBTN)

Bank Tabungan Negara atau BTN (IDX: BBTN) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya *Postspaarbank* di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan *Tyokin Kyoku* atau *Chokinkyoku*.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos. Pada tahun 1989 Bank BTN sudah mengeluarkan obligasi pertamanya, selanjutnya di tahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

4.1.8 PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP)

Bank OCBC NISP (sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP) atau selanjutnya disebut sebagai “Bank”, merupakan Bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan nama *NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*. Pada tahun 1997 OCBC Bank – Singapura memilih Bank NISP untuk menjadi partner lokal dalam pendirian Bank OCBC NISP (kemudian berganti nama menjadi OCBC Indonesia. OCBC Bank - Singapura kemudian menaikkan kepemilikan sahamnya melalui akuisisi dan penawaran tender saham publik hingga menjadi mayoritas sejak 2005.

Selanjutnya pada tahun 2008, sebagai bagian dari strategi jangka panjang, meningkatkan citra dan sebagai tanda dukungan controlling shareholder, Bank NISP menggunakan nama baru “Bank OCBC NISP”, diikuti dengan penguatan budaya dan dasar kebijakan di seluruh organisasi. dalam Bank OCBC NISP.

4.1.9 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BII) didirikan 15 Mei 1959. Setelah mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, BII mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada 1989. Sejak menjadi perusahaan publik, BII telah tumbuh menjadi salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia.

Pada 30 September 2008, Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Malayan Banking Berhad (Maybank), menyelesaikan pengambilalihan 100% saham Sorak Financial

Holdings Pte, Ltd, pemilik 55,51% saham BII. Pada Desember 2008, MOCS menyelesaikan penawaran tender untuk sisa saham BII dan meningkatkan kepemilikannya.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yang diteliti, yaitu variabel CSR (X_1), komite audit (X_2), komisaris independen (X_3), dan kepemilikan institusional (X_4).

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik, deskripsi variabel CSR (X_1) yang terdiri dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi perusahaan sampel selama tahun pengamatan disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1. Deskriptif Statistik *Corporate Social Responsibility* (X_1)

	CSR 2013	CSR 2014	CSR 2015	CSR 2016	Max	Min	Avg
BBTN	0.26	0.27	0.62	0.50	0.62	0.26	0.4125
BNGA	0.20	0.21	0.23	0.18	0.23	0.18	0.2050
BBNI	0.21	0.26	0.24	0.18	0.26	0.18	0.2225
BDMN	0.24	0.27	0.19	0.21	0.27	0.19	0.2275
BJBR	0.79	0.37	0.15	0.36	0.79	0.15	0.4175
NISP	0,70	0.23	0.20	0.21	0.23	0.20	0.2133
BBRI	0.58	0.38	0.35	0.20	0.58	0.20	0.3775
BMRI	0.16	0.37	0.45	0.76	0.76	0.16	0.4350
BNII	0.21	0.23	0.20	0.19	0.23	0.19	0.2075
Max	0.79	0.38	0.62	0.76	0.79	0.26	0.435
Min	0.16	0.21	0.15	0.18	0.23	0.15	0.205
Avg	0.3312	0.2877	0.2922	0.3100	0.4411	0.1900	0.3020
Std. dev	0.2273	0.0672	0.1540	0.2004	0.2425	0.0312	0.1042

Sumber Data: Laporan Keberlanjutan yang diperoleh dari *website* perusahaan

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata pengungkapan CSR pada perusahaan Perbankan periode 2013-2016 dengan rasio sebesar 0.3020. BMRI memiliki rata-rata jumlah pengungkapan CSR tertinggi yaitu 0.435., sedangkan BNGA memiliki rata-rata jumlah pengungkapan indikator kinerja CSR terendah yaitu 0.2050. Terdapat *range* yang cukup besar (50%) nilai dari perusahaan yang memiliki rata-rata tertinggi dengan perusahaan yang memiliki rata-rata terendah.

Pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR tertinggi adalah BJBR yaitu 0.79 dan terendah dimiliki oleh BMRI yaitu 0.16. Pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR tertinggi adalah BBRI yaitu 0.38 dan terendah dimiliki oleh BNGA yaitu 0.21. Pada tahun 2015, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR tertinggi adalah BBTN yaitu 0.62 dan terendah dimiliki oleh BJBR yaitu 0.15. Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR tertinggi adalah BJBR dan BMRI yaitu 0.76 dan terendah dimiliki oleh BNGA dan BBNI yaitu 0.18. Dari nilai tersebut terdapat *range* yang cukup kecil diantara nilai rata-rata terendah dan nilai tertinggi disetiap tahun yakni 0.33 pada 2013, 0.28 pada tahun 2014, 0.29 pada tahun 2015, dan 0.31 pada tahun 2016, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa implementasi CSR pada tiap perusahaan dapat dikatakan belum terlalu baik, karena pada tahun pengamatan implementasi CSR perusahaan mengalami fluktuasi pada nilai rata-rata.

Pada Tabel 4.1., nilai rata-rata pengungkapan indikator CSR seluruh perusahaan Perbankan tahun 2013-2016 adalah sebesar 0.30. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam pengungkapan

indikator CSR sebesar 0.10. Nilai rata-rata sebesar 0.30 (30 dari 91 item) dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data CSR. Sehingga dapat disimpulkan nilai rata-rata tersebut menggambarkan implementasi CSR pada perusahaan perbankan belum cukup baik dikarenakan memiliki indeks di bawah 50% dari 91 item berdasarkan *guidelines* GRI-G4.

Tabel 4.2. Deskriptif Statistik Komite Audit (X₂)

	Komite Audit 2013	Komite Audit 2014	Komite Audit 2015	Komite Audit 2016	Max	Min	Avg
BBTN	5	3	4	5	5	3	4.25
BNGA	6	6	6	4	6	4	5.50
BBNI	4	4	5	7	7	4	5.00
BDMN	5	5	5	5	5	5	5.00
BJBR	6	6	5	5	6	5	5.50
NISP	5	4	3	5	5	3	4.25
BBRI	3	3	4	7	7	3	4.25
BMRI	5	6	5	6	6	5	5.50
BNII	4	5	4	4	5	4	4.25
Max	6	6	6	7	7	5	5.5
Min	3	3	3	4	5	3	4.25
Avg	4.7778	4.6667	4.5556	5.3333	5.7778	4.0000	4.8333
Std. Dev	0.9718	1.2247	0.8819	1.1180	0.8333	0.8660	0.5863

Sumber Data: Laporan Tahunan yang diperoleh dari www.idx.com.

Berdasarkan Tabel 4.2., dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata komite audit pada perusahaan perbankan periode 2013-2016 berjumlah 5 orang. BNGA dan BMRI memiliki rata-rata komite audit tertinggi yaitu berjumlah 6 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap internal kedua perusahaan ini seharusnya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya karena memiliki ukuran komite audit yang lebih besar dibanding perusahaan lainnya.

Perusahaan dengan ukuran komite audit di atas rata-rata adalah BNGA, BMRI, BDMN, BBNI dan BJBR sedangkan sisanya memiliki komite audit di bawah rata-rata. Pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki komite audit tertinggi adalah BJBR dan BNGA yaitu berjumlah 6 orang dan terendah dimiliki oleh BBRI yaitu berjumlah 3 orang. Pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki komite audit tertinggi adalah BNGA, BJBR, dan BMRI yaitu berjumlah 6 orang dan terendah dimiliki oleh BBTN dan BBRI yaitu berjumlah 3 orang. Pada tahun 2015, perusahaan yang memiliki komite audit tertinggi adalah BNGA yaitu berjumlah 6 orang dan terendah dimiliki oleh NISP yaitu berjumlah 3 orang. Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki komite audit tertinggi adalah BBNI dan BBRI yaitu berjumlah 7 orang dan terendah dimiliki oleh BNGA dan BNII yaitu berjumlah 4 orang.

Tabel 4.3. Deskriptif Statistik Komisaris Independen (X_3)

	Komisaris Independen 2013	Komisaris Independen 2014	Komisaris Independen 2015	Komisaris Independen 2016	Max	Min	Avg
BBTN	0.5	0.5	0.57	0.42	0.6	0.4	0.4975
BNGA	0.5	0.66	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5400
BBNI	0.57	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5175
BDMN	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5250
BJBR	0.8	0.57	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6175
NISP	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5000
BBRI	0.67	0.71	0.63	0.56	0.7	0.6	0.6425
BMRI	0.57	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5175
BNII	0.50	0.66	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5150
Max	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6425
Min	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4975
Avg	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5414
Std. Dev	0.1045	0.0867	0.0683	0.0491	0.0906	0.0480	0.0522

Sumber Data: Laporan Tahunan yang diperoleh dari www.idx.com.

Berdasarkan Tabel 4.3., dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata jumlah komisaris independen pada perusahaan perbankan periode 2013-2016 dengan rasio sebesar 0.5. BBRI memiliki rata-rata komisaris independen tertinggi yaitu 0.642, sedangkan BBTN memiliki rata-rata komisaris independen terendah yaitu 0.4975. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan perbankan sudah mampu memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang mensyaratkan bagi perusahaan yang memiliki dewan komisaris lebih dari 2 orang, maka jumlah komisaris independen paling sedikit yakni 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris.

Pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen tertinggi adalah BJBR yaitu 0.8 dan terendah dimiliki oleh BBTN, BNGA, NISP dan BBNI yaitu 0.5. Pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen tertinggi adalah BBRI yaitu 0.71 dan terendah dimiliki oleh BBTN, BBNI, NISP dan BMRI yaitu 0.5. Pada tahun 2015, perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen tertinggi adalah BBRI yaitu 0.63 dan terendah dimiliki oleh BNII yaitu 0.4. Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen tertinggi adalah BBRI yaitu 0.56 dan terendah dimiliki oleh BBTN yaitu 0.42. Pada Tabel 4.3. Nilai rata-rata jumlah komisaris independen seluruh perusahaan perbankan tahun 2013-2016 adalah sebesar 0.5. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam jumlah komisaris independen sebesar 0.052. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari komisaris independen relatif kecil atau dapat dikatakan memiliki sebaran data yang normal.

Tabel 4.4. Deskriptif Statistik Kepemilikan Institusional (X_4)
(dalam persen)

	Kepemilikan Institusional 2013	Kepemilikan Institusional 2014	Kepemilikan Institusional 2015	Kepemilikan Institusional 2016	Max	Min	Avg
BBTN	35.31	34.88	36.49	36.59	36.59	34.88	35.8175
BNGA	96.93	96.92	97.94	94.09	97.94	94.09	96.4700
BBNI	38.35	38.81	38.44	38.24	38.81	38.24	38.4600
BDMN	67.37	74.16	74.18	73.95	74.18	67.37	72.4150
BJBR	7.84	17.7	18.73	18.73	18.73	7.84	15.7500
NISP	85.1	85.08	85.08	85.1	85.1	85.08	85.0900
BBRI	42.05	42.61	36.33	42.3	42.61	36.33	40.8225
BMRI	38.75	38.87	38.87	39.09	39.09	38.75	38.8950
BNII	78.92	78.98	78.98	78.96	78.98	78.92	78.9600
Max	96.93	96.92	97.94	94.09	97.94	94.09	96.4700
Min	7.84	17.7	18.73	18.73	18.73	7.84	15.7500
Avg	54.5133	56.4456	56.1156	56.3389	56.8922	53.5	55.8533
Std. Dev	28.9567	27.5167	27.8870	26.6947	27.3489	28.8534	27.7003

Sumber Data: Laporan Tahunan yang diperoleh dari www.idx.com.

Berdasarkan Tabel 4.4., dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan perbankan periode 2013-2016 sebesar 55.85%. BNGA memiliki rata-rata kepemilikan institusional terbesar yaitu 96.47%, sedangkan BJBR memiliki rata-rata kepemilikan institusional terendah yaitu 15.75%.

Pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki jumlah kepemilikan institusional tertinggi adalah BNGA yaitu 96.93% dan terendah dimiliki oleh BJBR yaitu 7.84%. Pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki jumlah kepemilikan institusional tertinggi adalah BNGA yaitu 96.92% dan terendah dimiliki oleh BJBR yaitu 17.7%. Pada tahun 2015, perusahaan yang memiliki jumlah kepemilikan institusional tertinggi adalah BNGA yaitu 97.94% dan terendah dimiliki oleh BJBR yaitu 18.73%.

Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki jumlah kepemilikan institusional tertinggi adalah BNGA yaitu 94.09% dan terendah dimiliki oleh BJBR yaitu 18.31%.

Pada Tabel 4.4., nilai rata-rata jumlah kepemilikan institusional seluruh perusahaan perbankan tahun 2013-2016 adalah sebesar 55.85%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam jumlah kepemilikan institusional sebesar 27.7. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari jumlah kepemilikan institusional relatif kecil atau dapat dikatakan memiliki sebaran data yang normal.

Tabel 4.5. Deskriptif Statistik ROE (Y)

	ROE 2013	ROE 2014	ROE 2015	ROE 2016	Max	Min	Avg
BBTN	16.05	10.95	16.84	18.35	18.35	10.95	15.548
BNGA	17.74	8.52	2.99	5.81	17.74	2.99	8.765
BBNI	22.5	23.6	17.2	15.5	23.6	15.5	19.7
BDMN	14.52	8.6	7.4	8	14.52	7.4	9.63
BJBR	26.76	18.92	23.05	21.81	26.76	18.92	22.635
NISP	11.9	9.68	9.6	9.85	11.9	9.6	10.258
BBRI	34.11	31.19	29.89	23.08	34.11	23.08	29.568
BMRI	22.23	20.95	23.03	11.12	23.03	11.12	19.333
BNII	16.18	6.1	8.47	11.84	16.18	6.1	10.648
Max	34.11	31.19	29.89	23.08	34.11	23.08	29.5675
Min	11.9	6.1	2.99	5.81	11.9	2.99	8.765
Avg	20.2211	15.39	15.3856	13.9289	20.6878	11.74	16.2314
Std. dev	6.9509	8.6048	8.8860	6.1015	6.8987	6.3942	7.1341

Sumber Data: Data Laporan Tahunan yang diperoleh dari www.idx.com.

Berdasarkan Tabel 4.5., dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata ROE pada perusahaan perbankan periode 2013-2016 sebesar 16.23%. BBRI memiliki rata-rata ROE terbesar yaitu 29.56%, sedangkan BNGA memiliki rata-rata ROE terendah yaitu 8.765%.

Pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki ROE tertinggi adalah BBRI yaitu 34.11% dan terendah dimiliki oleh NISP yaitu 11.9%. Pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki ROE tertinggi adalah BBRI yaitu 31.19% dan terendah dimiliki oleh BII yaitu 6.1%. Pada tahun 2015, perusahaan yang memiliki ROE tertinggi adalah BBRI yaitu 29.89% dan terendah dimiliki oleh BNGA yaitu 2.99%.

Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki ROE tertinggi adalah BBRI yaitu 23.08% dan terendah dimiliki oleh BNGA yaitu 5.81%. Pada tabel 4.5., nilai rata-rata nilai ROE seluruh perusahaan perbankan tahun 2013-2016 adalah sebesar 29.56%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam nilai ROE sebesar 7.13%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari nilai ROE relatif kecil atau penyebaran data yang rendah dan normal. Artinya, perusahaan perbankan memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dalam menghasilkan kinerja profitabilitas. Selama 4 periode pengamatan, secara umum perusahaan sudah dapat mengelola masing-masing perusahaannya dengan baik dikarenakan rata-rata kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba cukup tinggi yang dibuktikan dari nilai rata-rata ROE setiap tahun sebagian besar perusahaan berada diatas rata-rata.

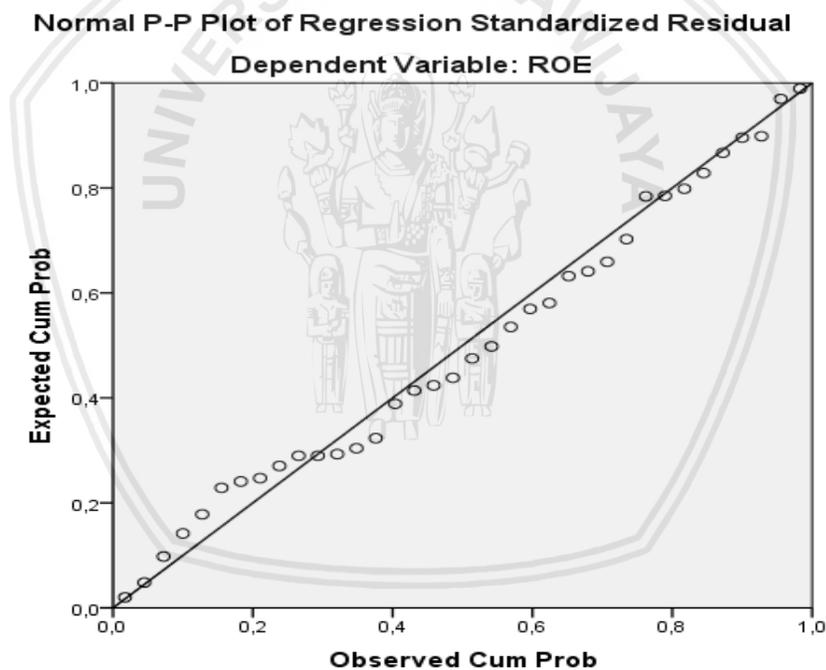
4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi yang diperlukan untuk dilakukannya analisis regresi linear berganda terpenuhi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian variabel lainnya. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian *Normal P-P Plot regression* terhadap model yang digunakan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.1. dan Tabel 4.6:

Gambar 4.1. Distribusi Normal Pengujian *Normalitas P-P Plot Regression*



Tabel 4.6. One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,70675428
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		,769
Asymp. Sig. (2-tailed)		,595

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tampak dari gambar tersebut menunjukkan distribusi normal yang ditunjukkan pada titik-titik menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut dibuktikan juga oleh uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang menunjukkan nilai signifikansi dari hasil sebesar 0,595 atau di atas 0,05.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF dengan angka 10. Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
CSR	0.793	1.262
Komite Audit	0.991	1.009
Komisaris Independen	0.860	1.163
Kepemilikan Insitusional	0.810	1.234

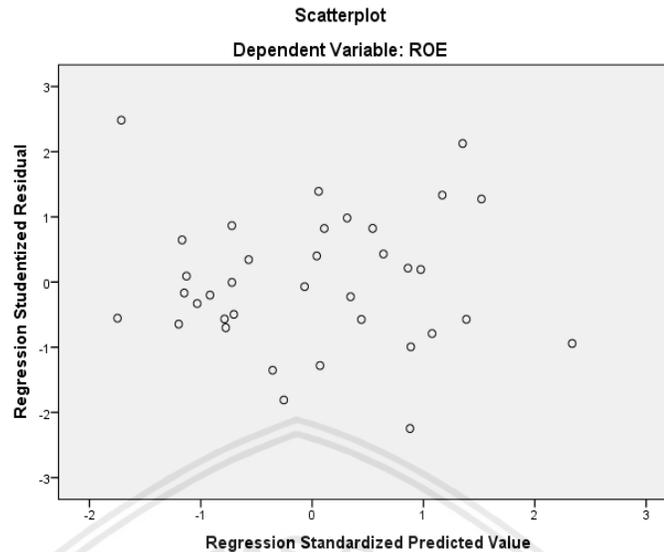
Sumber: *Output SPSS*

Hasil pengujian pada Tabel 4.7. menunjukkan bahwa nilai VIF untuk CSR adalah 1,262, VIF untuk komite audit adalah 1,009, VIF untuk komisaris independen adalah 1,163, VIF untuk kepemilikan institusional adalah 1,234. Dari keempat variabel independen dalam model regresi ini menghasilkan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas, atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji *Scatter Plot*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

Gambar 4.2. Grafik *Scatterplot* Uji Heterokedastisitas



Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4.4 Analisis Regresi

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel independen, yaitu CSR (X_1), komite audit (X_2), komisaris independen (X_3), kepemilikan institusional (X_4) masing-masing terhadap variabel dependen yaitu ROE (Y). Dengan menggunakan *SPSS Ver. 21* Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.8:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19,310	8,281		2,332	,026
CSR	-,490	5,605	-,011	-,087	,931
Komite Audit	-1,284	,831	-,174	-1,546	,132
Komisaris Independen	25,836	11,635	,269	2,221	,034
Kepemilikan Instiusional	,192	,036	,656	5,252	,000

b. Dependent Variable ROE

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.8. adalah sebagai berikut:

$$Y = 19,310 - 0,490 X_1 - 1,284 X_2 + 25,836 X_3 + 1,92 X_4 + e$$

Makna dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan menjadi:

1. Nilai konstanta sebesar 19,310 dapat diartikan jika nilai CSR (X_1), komite audit (X_2), komisaris independen (X_3), dan kepemilikan institusional (X_4) sama dengan nol, maka ROE yang diperoleh sebesar 19,310
2. ROE akan menurun untuk setiap tambahan CSR (X_1), jadi apabila CSR mengalami peningkatan, maka ROE akan menurun sebesar 0,490 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
3. ROE akan menurun untuk setiap tambahan komite audit (X_2), jadi apabila komite audit mengalami peningkatan, maka ROE akan menurun sebesar 1,284 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

4. ROE akan meningkat untuk setiap tambahan komisaris independen (X_3), jadi apabila komisaris independen mengalami peningkatan, maka ROE akan meningkat sebesar 25,836 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
5. ROE akan meningkat untuk setiap tambahan kepemilikan institusional (X_4), jadi apabila kepemilikan institusional mengalami peningkatan, maka ROE akan meningkat sebesar 0,192 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

4.5.1 Uji F

Uji F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- b. H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Tabel 4.9 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1285,186	4	321,297	12,047	0.000
Residual	826,758	31	26,670		
Total	2111,944	35			

- a. Variabel Dependent ROE
- b. Sumber Data: Output SPSS

Berdasarkan dengan Tabel 4.9 nilai F hitung sebesar 12,047. Sedangkan F tabel residual sebesar 2,68. Karena F hitung > F tabel yaitu $12,047 > 2,68$ atau nilai Sig. F $(0,000) < \alpha = 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan.

Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga bahwa variabel terikat (ROE) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas, CSR (X_1), Komite audit (X_2), Komisaris Independen (X_3), dan Kepemilikan Institusional (X_4). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi termasuk dalam kategori *fit* sehingga model regresi tersebut layak digunakan.

4.5.2 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas CSR (X_1), komite audit (X_2), komisaris independen (X_3), dan kepemilikan institusional (X_4) terhadap variabel terikat (ROE). Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi juga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya (Suliyanto, 2011). Dalam uji koefisien determinasi digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 4.10. berikut:

Tabel 4.10. Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
,780	,609	,558

a. Dependent Variable ROE

Dari analisis pada Tabel 4.10. diperoleh hasil R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,609 atau 60,9%. Nilai tersebut berarti kemampuan variabel bebas yaitu CSR (X_1), komite audit (X_2), komisaris independen (X_3), dan kepemilikan institusional (X_4) dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 60,9%. Sedangkan sisanya 39,1% variabel ROE dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain sedangkan untuk koefisien korelasi antara variable bebas terhadap variable ROE menunjukkan nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,780. nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu CSR (X_1), komite audit (X_2), komisaris independen (X_3), dan kepemilikan institusional (X_4) dengan ROE termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8.

4.5.3 Uji t

Uji t atau *t test* digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.11:

Tabel 4.11. Hasil Uji t

Variabel	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	2.332	0,026	
CSR	- 0,087	0,931	Tidak Signifikan
Komite Audit	- 1,546	0,132	Tidak Signifikan
Komisaris Independen	2,221	0,034	Signifikan
Kepemilikan Institusional	5,525	0,000	Signifikan

- a. Dependent Variable ROE
- b. Sumber Data : Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.11. diperoleh hasil sebagai berikut.

1. **H₁: CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan**

Uji t antara X₁ (CSR) dengan Y (ROE) menunjukkan t hitung = -0,087. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 31) adalah sebesar 2,040. Karena -t hitung > -t tabel yaitu $-0,087 > -2,040$ maka pengaruh X₁ (CSR) terhadap ROE adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H₀ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. **H₂: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan**

Uji t antara X₂ (komite audit) dengan Y (ROE) menunjukkan t hitung = - 1,546. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 31) adalah sebesar 2,040. Karena -t hitung < -t tabel yaitu $- 1,546 < -2,040$ maka pengaruh X₂ (komite audit) terhadap ROE adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H₀ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. H₃: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Uji t antara X₃ (komisaris independen) dengan Y (ROE) menunjukkan t hitung = 2,221 . Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 31) adalah sebesar 2,040. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,221 > 2,040 maka pengaruh X₃ (komisaris independen) terhadap kinerja keuangan adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

4. H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Uji antara X₄ (kepemilikan institusional) dengan Y (ROE) menunjukkan t hitung = 5,252. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 31) adalah sebesar 2,040. Karena t hitung > t tabel yaitu 5,252 > 2,040 maka pengaruh X₄ (kepemilikan institusional) terhadap ROE adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara signifikan.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis CSR terhadap kinerja keuangan, dapat diketahui bahwa CSR memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Firli (2015) yang menyatakan CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun hal

ini berbeda dengan hasil penelitian Syahnaz (2013) yang mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan CSR, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari *stakeholder* sehingga perusahaan dapat beroperasi secara optimal yang pada akhirnya diharapkan mampu menjadikan kinerja keuangan akan meningkat.

Pelaksanaan dan pengungkapan CSR belum dapat dijadikan tolok ukur bahwa suatu perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang dan akan memberikan legitimasi atau kepercayaan kepada perusahaan. Berdasarkan deskriptif statistik CSR menunjukkan bahwa implementasi CSR pada perusahaan perbankan menunjukkan nilai sebesar 0.30 (30 dari 91 item) dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data CSR yang dapat diartikan implementasi CSR belum cukup baik dikarenakan memiliki indeks di bawah 50% dari 91 item berdasarkan *guidelines* GRI-G4. Hal ini belum bisa meningkatkan kinerja keuangan secara nyata dikarenakan investor belum mementingkan hal tsb karena menurut Winarti dan Imron (2012) mengatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena kualitas pengungkapan CSR pada perusahaan masih sangat rendah dan belum mengikuti standar yang ada. Hasil ini tidak mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan dengan memenuhi harapan *stakeholder* perusahaan akan mampu mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Deegan, 2014).

4.6.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis komite audit terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara tidak signifikan

terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Rachma (2016) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Agung (2016) yang menyebutkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kinerja keuangan.

Komite audit menurut peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep.29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris untuk mengawasi keefektifan operasional perusahaan. Anggotanya paling sedikit berjumlah 3 orang yang berasal dari dewan komisaris independen dan pihak luar perusahaan.

Berdasarkan deskriptif statistik komite audit memiliki jumlah yang sesuai, jumlah komite audit yang dimiliki terendah yang dimiliki perusahaan adalah 3, sedangkan yang tertinggi berjumlah 7. Jumlah komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dalam memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan, banyaknya komite audit di suatu perusahaan belum dapat dijadikan tolok ukur bagaimana perusahaan dalam menjamin pengawasan terhadap pengelola perusahaan. Sehingga dapat diartikan komite audit belum memaksimalkan tugasnya untuk membantu tugas dari dewan komisaris.

4.6.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis komisaris independen terhadap kinerja keuangan, dapat diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan proporsi komisaris independen maka kinerja keuangan akan meningkat. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Khansa (2017) yang menyatakan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa adanya komisaris independen seharusnya dapat melindungi kepentingan *stakeholder* dalam meningkatkan pengawasan atas kinerja manajemen secara maksimal. Menurut Haniffa dan Cooke (2002) apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan.

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris. Berdasarkan deskriptif statistik komisaris independen memiliki proporsi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jumlah rata-rata komisaris independen dalam perusahaan

perbankan memiliki nilai 0.54 (54%) yaitu memenuhi ketentuan yang mengatakan komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

4.6.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan serta institusi lainnya pada akhir tahun (Sabrinna, 2010). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung (2016) yang menyatakan bahwa meningkatnya kepemilikan saham oleh investor institusi menyebabkan tekanan kepada perusahaan untuk menerapkan sistem GCG semakin besar sehingga mampu mendorong peningkatan nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan deskriptif statistik kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 55.8% . Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat berfungsi sebagai agen yang melakukan *monitoring* kinerja perusahaan yang memungkinkan pengawasan lebih optimal terhadap manajemen. Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh pemilik institusional tersebut diharapkan mampu membuat perusahaan lebih efisien dalam penggunaan aset sebagai sumber daya perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik mayoritas perusahaan juga diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan konflik agensi (*agency conflict*). Sesuai dengan hasil penelitian ini yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan karena ketika konflik agensi dapat diminimalisir, hal ini kemungkinan mampu mengurangi biaya agensi (*agency cost*) yang ditimbulkan dan akhirnya berimplikasi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, menurut hasil survei *Asian Development Bank* dalam Hardiningsih (2010) yang menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting dalam melakukan *controlling* terhadap perusahaan.

4.7 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel CSR, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Implikasi ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Hal ini memberikan gambaran bagi perusahaan bahwa CSR belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan, CSR belum bisa dijadikan tolok ukur bagi investor dalam pertimbangannya untuk berinvestasi. Sedangkan untuk mekanisme GCG dalam hal ini, perusahaan harus memilih komisaris independen dan komite audit secara lebih selektif karena posisi tersebut dapat menentukan keberhasilan

dan peningkatan kinerja perusahaan. Komisaris independen yang kompeten dan profesional akan dapat mengawasi kinerja dewan direksi dalam melaksanakan strategi dan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan dengan baik, sehingga kinerja mereka selalu terkontrol dan kinerja perusahaan pun akan meningkat. Kemudian perusahaan harus memilih komite audit yang benar-benar independen dan memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan internal perusahaan karena peran komite audit sangat penting untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi internal perusahaan, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih kondusif dan tindak kecurangan maupun manipulasi dapat diminimalisir. Perusahaan hendaknya menerapkan kepemilikan institusional agar manajemen dapat melakukan tugasnya dengan baik karena adanya pengawasan dari pihak institusi dan manajer itu sendiri. Kepemilikan institusional dapat menjadi *controller* terhadap manajemen perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2006).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel CSR dan dimensi GCG terhadap kinerja keuangan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel CSR (X_1), komite audit (X_2), komisaris independen (X_3), dan kepemilikan institusional (X_4), sedangkan variabel terikat yaitu kinerja keuangan diukur dengan variabel ROE (Y). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. CSR belum dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa CSR mampu belum menjadi tolok ukur bagi investor yang akan menanamkan modalnya, karena CSR yang dilakukan dan diungkapkan perusahaan belum dianggap memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat luas.
2. Komite audit belum dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Hal ini disebabkan pembentukan komite audit hanya untuk pemenuhan regulasi pemerintah saja, sehingga komite audit belum bisa memaksimalkan fungsinya untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Semakin banyaknya komite audit bertujuan untuk memberikan sumber informasi dan pengetahuan yang lebih yang dapat menghasilkan keputusan

yang baik dan objektif, namun proporsi komite audit yang memenuhi syarat belum bisa menjamin kinerja komite audit tersebut.

3. Komisaris independen dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka dapat membuat kinerja keuangan perusahaan meningkat. Hal ini disebabkan komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan dan melakukan tugas pengawasan secara efektif, dengan adanya komisaris independen juga dapat mengatasi masalah keagenan yang ada di perusahaan.
4. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Hal ini disebabkan karena pihak institusional selaku pemilik perusahaan dapat menjadi *controller* terhadap manajemen perusahaan untuk mengawasi tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh manajemen sehingga antara pihak manajemen dan institusional dapat bekerja sama guna mengembangkan perusahaan. Ketatnya pengawasan yang dilakukan investor insitusional sangat tergantung besarnya investasi yang dilakukan, semakin besarnya kepemilikan institusional maka semakin ketat juga pengawasan yang dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini menilai konsep CSR sebatas pengungkapan indikator CSR yang terdapat didalam laporan keberlanjutan dan hanya menggunakan dimensi GCG komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya agar menilai konsep CSR dari bentuk aktivitas sosialnya dan mempertimbangkan dimensi GCG lainnya model penelitian selanjutnya sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih mendalam.
2. Penelitian ini menyimpulkan CSR dan komite audit belum mampu meningkatkan kinerja keuangan secara nyata. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan pelaporan CSR dan proporsi dari komite audit serta memaksimalkan kinerja dari komite audit tersebut, sehingga diharapkan perusahaan memiliki mekanisme yang tepat dengan kinerja yang optimal agar mampu meningkatkan kinerja keuangan.
3. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu perusahaan dapat merancang strategi untuk memaksimalkan potensi dari komisaris independen dan kepemilikan institusional untuk meningkatkan kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, CA. 2002. Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting Beyond Current Theorizing. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 15 No.2.
- Agung, Putra Setya. 2016. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada perusahaan Perbankan yang Go-Public di BEI Indonesia tahun 2012-2014.
- Ahmed, M.K. 2013. Corporate Social Responsibility Practices of Commercial Banks in Bangladesh: A case study on Southeast Bank Ltd. *IOSR Journal of Business and Management*.
- Aprianingsih, Astri. 2016. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Periode 2011-2014.
- Ardianto, E. dan Machfudz, D. 2011. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Arifani. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Branco, M. C., & Rodrigues L. L. 2006. Communicate of Corporate Social Responsibility by Portuguese Banks : A legitimacy theory perspective. *Coporate Communications: An International Journal*.
- Brigham, Eugene F. Dan J.F. Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Cadbury Committe. 1992. *Report of The Committe on The Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee
- Deegan, Craig. 2000. *Financial Accounting Theory*. Australia NSW: McGrawHill.
- Deegan, Robin, Tobin. 2002. The Legitimasing Effect of Social and Environment Disclosure – A Theoretical Foundation. *Acoounting, Auditing and Accountability Journal*. 10 (4): 562-584.
- Dorasamy, N. 2013. Corporate Social Responsibility and Ethical Banking for Developing Economies. *Journal of Economics and Behavioral Studies*.

- Dwijayanti, Erny. 2013. Pengaruh Pengungkapan Tanggungjawab Sosial terhadap Earning Response Coefficient (ERC), Malang.
- Fahmi, Ilham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Pertama*. Bandung: ALFABETA.
- Firli, Hidayat. 2015. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan *Earning Response Coefficient (ERC)* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013). *Skripsi*. Malang : Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya
- FCGI. 2002. *Seri tata Kelola Perusahaan – Corporate Governance* Edisi Kedua. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. 2012. *Teori Organisasi*. Yogyakarta : BPF
- Gray, *et al.* 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.
- GRI Guidelines and Standard Setting.
2010. <https://www.globalreporting.org/information/g4/pages/default.aspx>.
- Hadi, Noor. 2011. *Corporate Social Responsibility edisi pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haniffa, R.M and T.E. Cooke. 2002. Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporation. *ABACUS*, Vol. 38. No 3, 2002.
- Hendriksen, Eldon S dan Van Breda Michael F. 2002. *Teori Akuntansi, Buku kedua*. Batam: Interaksera.
- Hillman, A. J., & Keim, G. D. 2001. Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues: *Strategic Management Journal*, 22(1), 125-39.
- Jones, Thomas M. and Wicks, Andrew C. 1999. “Convergent Stakeholder Theory, “*Academy of Management Review*, Vol. 24, No. 2, 206-221.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khansa, Shabibah. 2017. ‘Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015)’. *Skripsi*. Malang : Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta. (Online). (<http://www.governance.indonesia.or.id>.)
- Lastanti, Hexana Sri. 2004. “Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar. Konferensi Nasional akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance.
- Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta. (2013). “Dividend Policy and Foreign Ownership”. Simposium Nasional Akuntansi XVI, hlm. 3401-3423.
- McWilliams and Siegel. 2001. *Corporate Social Responsibility and Financial Performance*
- Munawir, S. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat*. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty
- O’Donovan, G. 2002. “Enviromental Disclosures In The Annual Report : Extending The Applicability And Predictive Power of Legitimacy Theory”. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 15.
- Putu, Desak. 2016. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Pada perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2010-2013)*
- Rachma. 2016. *Pengaruh Mekanisme GCG dan Pengungkapan CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014*.
- Ross, Stephen. 2009. *Pengantar Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : PT Salemba Empat.

- Sembiring, 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Paper Presented at the Seminar Nasional Akuntansi, Solo.
- Subramanyam, K.R. 2014. *Financial Statement Analysis*. Eleventh Edition. Singapore: Mc Graw Hill.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahnaz, Melisa. 2013. 'Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan'. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Tumirin. 2007. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*. Jurnal BETA Volume 6, No.1.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 pasal 74 tahun 2007
- Website <http://www.idx.co.id>
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*: PT Gramedia Jakarta.
- World Business Council for Sustainable Development. 2000. *Corporate Social Responsibility*:
- Yao *et. al.* 2011. *Determinants of Social Responsibility Disclosure by Chines Firms*. University of Nottingham China Policy Institute.
- Yuliana, R., Purnomosidhi, B. & Sukoharsono, E.G. 2008. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Reaksi Investor. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.